



**JURNAL  
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS**

Laman Jurnal : [www.jaga.unand.ac.id](http://www.jaga.unand.ac.id)  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas  
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online) .....



---

## ***Good Government Governance dan Kualitas Anggaran*** **Fransisca Harpranisa Cahyani Ronanda<sup>a</sup>, Firma Sulistiyowati<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, [harpranisa97@gmail.com](mailto:harpranisa97@gmail.com)

<sup>b</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, [f.sulistiyowati@gmail.com](mailto:f.sulistiyowati@gmail.com)

---

### **INFORMASI ARTIKEL**

**Sejarah artikel:**

Diterima: 6 Mei 2020

Diterima revisian: 20 Agustus  
2020

Diterima publikasi: 25 Agustus  
2020

**Kata Kunci:**

*Good Government Governance,  
Budget quality*

---

### **ABSTRAK**

*This study aims to investigate the effect of good government governance on-budget quality. This research was conducted at the Regional Government Work Unit (SKPD) of the Yogyakarta City Government. The approach used in this research is a quantitative approach with a survey method. The survey was conducted by distributing questionnaires to 341 employees from 55 SKPDs in the Yogyakarta City Government. The research data were analyzed using simple regression to determine the effect of the independent variable good government governance on the dependent variable of budget quality. The instruments used are derived from the principles of good corporate governance and quality budget aspects. This study indicates that the implementation of good government governance affects the quality of the SKPD budget in the Yogyakarta City Government.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penganggaran menjadi fungsi utama pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan. Anggaran memiliki fungsi sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian di SKPD, sehingga anggaran merupakan hal yang wajib disusun dan direncanakan dengan matang

oleh setiap SKPD. Setiap anggaran yang disusun wajib memperhatikan kualitasnya, semua aspek seperti item biaya, input, output, dan hasil harus tersedia dengan jelas dalam anggaran yang dirancang sebagai bahan informasi.

Kualitas anggaran dapat dilihat dari serapan anggaran yang tinggi, antara anggaran yang telah direncanakan harus konsisten dengan pelaksanaannya. Berdasarkan berita pada nasional.kontan.co.id, kurang optimalnya penyerapan anggaran disebabkan karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang semakin besar. Hal ini dapat berakibat pada pelaksanaan pembangunan daerah. Anggaran belanja pembangunan dengan jumlah lebih besar tidak menjamin dapat tepat sasaran pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan anggaran dapat dikatakan berjalan dengan baik jika pembangunan terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki SiLPA. Dana sebesar Rp 65 miliar mengalami pembengkakan menjadi Rp 254 miliar, hal tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan dan penyerapan anggaran untuk program kegiatan di pemerintah kota Yogyakarta belum dilakukan secara matang. Sehingga ada ketidaksesuaian antara rangkaian kegiatan yang telah diusulkan dengan rangkaian dokumen perencanaan. Untuk menyusun kegiatan baru dalam perubahan APBD 2018, Pemerintah Kota Yogyakarta harus berhati-hati dalam melakukannya, hal ini agar anggaran tidak terkesan habis dalam waktu cepat (Razak: 2018). Pos belanja juga perlu diperhatikan karena jika pos belanja terlalu banyak dialokasikan ke pos belanja pegawai, program yang berasal dari usulan masyarakat lewat musrebang tidak dapat berjalan dengan maksimal dan masyarakat akan dirugikan. Perubahan anggaran yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai anggaran yang berkualitas. Suatu anggaran berkualitas apabila anggaran tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat, tidak menimbulkan perbedaan, serta tidak menguntungkan gender yang lain (Lucyanda dan Sari, 2009). Untuk mencapai anggaran yang berkualitas baik, selain ketepatan waktu dan adanya kesesuaian antara rangkaian usulan kegiatan dengan rangkaian dokumen perencanaan, juga perlu didasarkan pada penerapan *Good Government Governance* yang berpedoman pada Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) tentang *Good Public Governance*. Hal ini sesuai dengan pendapat Egbride dan Godwyns (2012), yang menyatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara

*good governance* dan penganggaran yang baik, untuk mencapai anggaran yang baik perlu dilandasi oleh pemerintahan yang baik.

*Good Government Governance* adalah aturan perilaku yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) tentang pedoman *Good Public Governance* di Indonesia menyatakan bahwa ada lima prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan *good government governance* yaitu: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Pedoman ini sebagai acuan dasar untuk menjalankan *good government governance* agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan pemerintahan, terutama dalam mencapai anggaran yang berkualitas di SKPD, prinsip-prinsip dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) tentang pedoman *Good Public Governance* sangat penting untuk diterapkan sebagai acuan dasar. Penelitian Octariani, Akram, dan Animah (2017), menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh terhadap kualitas anggaran. Adanya prinsip-prinsip *good governance* sebagai dasar tata kelola pemerintahan diharapkan berpengaruh terhadap kualitas anggaran. Prinsip-prinsip *good governance* diyakini mampu mendorong komitmen setiap SKPD dalam melakukan kegiatan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *Good Government Governance* terhadap kualitas anggaran di setiap SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah penerapan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Anggaran di setiap SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Government Governance* di 55 SKPD Kota Yogyakarta terhadap Kualitas Anggaran SKPD.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bidang keilmuan, dunia praktik, dan bagi pengambil kebijakan. Kontribusi bagi bidang keilmuan, khususnya bidang ilmu akuntansi di sektor pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi akademisi

maupun memicu peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang terkait dengan tata kelola dan kualitas anggaran pemerintah. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi dalam dunia praktik khususnya bagi Pemda-pemda yang menerapkan *Good Government Governance* bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak pada kualitas anggaran. Sementara bagi pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan informasi untuk selalu berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Government Governance* dalam merencanakan anggaran yang berkualitas di setiap SKPD.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **2.1. *Goal Setting Theory***

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menjelaskan mengenai pemikiran dan niat seseorang dapat mengatur perilaku seseorang. Target merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Penetapan tujuan memiliki konsep sesuai dengan pendapat Locke (1986) dalam Lubis (2017:127), yaitu organisasi berharap agar pegawai dapat memahami tujuan yang diinginkan dan dapat mempengaruhi perilaku kerjanya. Adanya kejelasan dalam penetapan tujuan akan berpengaruh pada hasil yang lebih baik, karena tujuan harus memberikan kejelasan bagi seseorang terkait dengan apa yang harus dia lakukan. Pencapaian tujuan organisasi dapat dipengaruhi secara khusus oleh penetapan tujuan. Tujuan yang jelas, dapat diukur, dan memiliki batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan tugas, terkait dengan teori penetapan tujuan ini.

Apabila dalam proses penganggaran diterapkan teori penetapan tujuan, diharapkan target anggaran dapat tercapai. Konsep dari teori penetapan tujuan adalah bahwa perilaku mereka dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang arti tujuan dengan baik. Dalam konteks ini, setiap SKPD perlu memperhatikan dan memahami dengan baik mengenai tujuan anggaran. Karena hal ini akan berdampak pada kualitas dari anggaran tersebut, pemahaman yang baik tentang tujuan anggaran perlu diperhatikan oleh setiap SKPD karena akan berdampak pada kualitasnya. Dengan penerapan *goal setting theory*, diharapkan setiap SKPD

memiliki perilaku yang dapat terarah sesuai dengan pedoman prinsip-prinsip *Good Government Governance*.

## **2.2. Kualitas Anggaran SKPD**

Kualitas anggaran dihasilkan dari proses pengalokasian anggaran yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah oleh pihak-pihak yang terlibat, yang secara bijak merumuskan suatu kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran (Octariani 2016). Anggaran yang berkualitas dihasilkan dari kerja pegawai dalam penyusunan anggaran, sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kualitas Anggaran dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan kualitas hasil kerja dari penyusunan anggaran sesuai kriteria RKA yang baik berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD. RKA-SKPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

## **2.3. Good Government Governance**

Menurut Segara (2017), “*good governance* pada lingkungan pemerintahan sering dikenal dengan istilah *Good Government Governance* (GGG)”. *Good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tata kelola yang diterapkan untuk semua kegiatan publik agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintahan yaitu pelayanan untuk publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik diharapkan tata pemerintahan yang baik dapat terwujud, berdasarkan pedoman dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) tentang *Good Public Governance*, ada lima prinsip yang diterapkan dalam mewujudkan *Good Government Governance* yaitu: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.

## **2.4. Hubungan Good Government Governance dan Kualitas Anggaran**

Tanpa adanya tata kelola yang baik, kualitas anggaran tidak dapat tercapai. Perencanaan anggaran yang baik dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dalam perencanaan penganggaran, apabila pemerintah menerapkan tata pemerintah yang baik, yaitu: demokrasi,

transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Oleh sebab itu setiap prinsip dari tata kelola pemerintah tersebut wajib tercermin pada saat proses penganggaran.

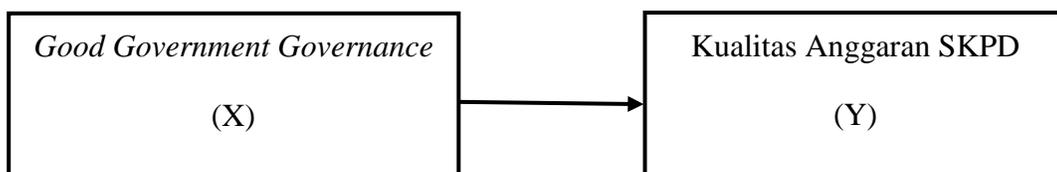
Keterkaitan antara *Good Government Governance* dan kualitas anggaran SKPD dapat dijelaskan melalui konsep *goal setting theory* dengan prinsip komitmen dan kompleksitas tugas individu. Adanya komitmen dari setiap SKPD untuk selalu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses anggaran, akan mampu menghasilkan anggaran yang berkualitas. Egbide dan Godwyns (2012), menyatakan bahwa *good governance* dan penganggaran yang baik memiliki hubungan yang jelas, pemerintahan yang baik adalah dasar untuk mencapai anggaran yang baik.

Hasil penelitian Octariani, Akram, dan Animah (2017) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas anggaran dan Tarmizi (2007) juga mengemukakan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas anggaran. Penegakan hukum dapat melindungi kelompok dari tindakan yang kurang menyenangkan dalam proses penganggaran (Carlizt, 2013). Penelitian Handayani (2009) menjelaskan bahwa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas anggaran. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini.

H<sub>0</sub>: Penerapan *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.

H<sub>a</sub>: Penerapan *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan hipotesis di atas, penelitian ini meliputi satu variabel bebas yaitu *Good Government Governance* yang mempengaruhi satu variabel terikat yaitu Kualitas Anggaran SKPD. Apabila digambarkan, model dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan *Good Government Governance* dan Kualitas Anggaran SKP

### 3. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode kuantitatif dapat menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:23). Sedangkan pendekatan survei dipilih dengan menanyakan kepada sejumlah orang mengenai objek atau perilaku yang menjadi fokus peneliti (Sugiyono 2017:48).

#### 3.1. Tempat Penelitian Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan di 55 SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu pejabat SKPD dengan kriteria mampu memahami secara teknis mengenai prosedur penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran SKPD. Jumlah untuk seluruh pejabat SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 341, yang terdiri dari:

Tabel 1. Responden Penelitian

No	SKPD	Jumlah (orang)
1	Sekretariat Daerah	1
2	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan	4
3	Bagian Hukum	4
4	Bagian Administrasi dan Pengendalian	4
5	Bagian Perekonomian Pengembangan	4
6	Bagian Layanan Pengadaan	4
7	Bagian Umum	4
8	Bagian Protokol	4
9	Bagian Organisasi	6
10	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat	1
11	Staf Ahli Bidang Perekonomian	1
12	Staf Ahli Bidang Umum	1
13	Sekretariat DPRD	4
14	Inspektorat	8
15	Dinas Pendidikan Yogyakarta	8
16	Dinas Kesehatan Yogyakarta	8
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kas Pemukiman	8
18	Dinas Kebudayaan	7
19	Dinas Perhubungan	6
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	8
21	Dinas Sosial	7
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6

24	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6
25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	5
27	Dinas Kebakaran	5
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	7
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5
30	Dinas Pertanian dan Pangan	7
31	Dinas Lingkungan Hidup	8
32	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian	8
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8
34	Dinas Pariwisata	7
35	Satuan Polisi Pamong Praja	8
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9
37	Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan	6
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara	10
39	Rumah Sakit Umum Daerah	8
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7
41	Kantor Kesatuan Bangsa	5
42	Kecamatan Danurejan	7
43	Kecamatan Gedongtengen	7
44	Kecamatan Gondokusuman	7
45	Kecamatan Jetis	7
46	Kecamatan Kotagede	7
47	Kecamatan Kraton	7
48	Kecamatan Mantriweron	7
49	Kecamatan Mergangsan	7
50	Kecamatan Ngampilan	7
51	Kecamatan Pakualaman	7
52	Kecamatan Tegalrejo	7
53	Kecamatan Umbulharjo	7
54	Kecamatan Wirobrajan	7
55	Kecamatan Gondomanan	7
<b>Jumlah</b>		<b>341</b>

### 3.2. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

#### 3.2.1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance* (X). Penerapan *Good Government Governance* dalam proses penyusunan rencana anggaran dari awal sampai dengan akhir yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *Good Government Governance* terdiri dari lima pernyataan yang meliputi lima prinsip yang terkandung di dalamnya, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Item pernyataan untuk mengukur prinsip-prinsip *Good Government Governance* tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pertanyaan tentang *good government governance*

a	Demokrasi	Ada kesempatan yang di berikan oleh SKPD kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat untuk kepentingan SKPD
b	Transparansi	Informasi anggaran SKPD sudah tersedia di <i>website</i> pemerintah kota dan mudah untuk diakses setiap waktu oleh publik/masyarakat dalam meperoleh informasi
c	Akuntabilitas	Tugas dan tanggung jawab sudah sesuai diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan untuk mencapai hasil program kegiatan SKPD
d	Budaya hukum	Anggaran yang berkualitas sudah sesuai dengan aturan hukum yang kuat dan memiliki kepastian
e	Kewajaran dan kesetaraan	Penyusunan pengajuan, dan pengalokasian anggaran, kegiatan, dan output yang akan ditetapkan sudah sesuai dengan usulan publik/ masyarakat

Indikator variabel *Good Government Governance* diadopsi dari penelitian Octariani, Akram, dan Animah (2017) disesuaikan dengan pedoman KNKG (2008) tentang *Good Public Governance*.

### 3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Anggaran SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta (Y). Adanya persepsi dari setiap SKPD dalam kegiatan penganggaran yang dimulai dari proses pengalokasian anggaran, diharapkan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Kota dapat dengan bijak merumuskan suatu program sesuai

dengan harapan masyarakat. Jika hal tersebut tercapai maka tercapailah anggaran SKPD yang berkualitas. Kualitas anggaran ditunjukkan dari anggaran yang disusun berdasarkan kriteria penyusunan anggaran yang baik. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas anggaran adalah dukungan organisasi, keakuratan pengeluaran, keakuratan penerimaan, relevansi program dengan masalah saat ini, penyusunan anggaran secara cerdas dan logis, tepat waktu, mengandung biaya informasi, termasuk di dalamnya informasi dari kelompok sasaran, serta konsisten dengan dokumen perencanaan. Daftar pernyataan untuk mengukur variabel Kualitas Anggaran SKPD disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pernyataan tentang Kualitas Anggaran SKPD

a	Dukungan organisasi	Ada dukungan unit-unit SKPD yang mengacu pada visi dan misi SKPD
b	Keakuratan pengeluaran	Ada kesesuaian antara pos belanja yang tercantum dalam RKA-SKPD dengan standar belanja yang berlaku dan menunjukkan jumlah yang rasional (tidak <i>overestimate</i> )
c	Keakuratan penerimaan	Anggaran pendapatan di dalam RKA-SKPD telah menunjukkan potensi pendapatan secara objektif (tidak <i>underestimate</i> )
d	Relevansi program dengan masalah saat ini	Sudah ada hubungan yang relevan antara kegiatan yang diusulkan yang tercantum dalam RKA-SKPD dengan permasalahan terkini yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi SKPD dan daerah
e	Penyusunan anggaran secara cerdas dan logis	Dokumen anggaran telah disusun secara logis yaitu adanya input, output, hasil dan capaian program
f	Tepat waktu	Anggaran telah disusun tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang disepakati
g	Mengandung biaya informasi	Dokumen anggaran telah memuat informasi biaya satuan tenaga, material dan perlengkapan, total biaya kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan, serta

		lokasi kegiatan
h	Mengandung informasi dari kelompok sasaran	Dokumen anggaran sudah memuat informasi kelompok sasaran penerima manfaat anggaran
i	Konsisten dengan dokumen perencanaan	Rangkaian usulan kegiatan sudah konsisiten dengan seluruh rangkaian dokumen perencanaan

Indikator untuk mengukur Kualitas Anggaran SKPD diadopsi dari pertanyaan Manik (2009) dalam Marpaung (2016), Putri (2011) dan Octariani, Akram, dan Animah (2017), yang meliputi sembilan item pertanyaan. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Anggaran SKPD.

### 3.2.3. Teknik Analisis Data

Langkah pertama yang dilakukan dalam teknik analisis data adalah melakukan analisis statistik deskriptif, dimana data disajikan dalam bentuk tabel, perhitungan minimal, maksimal, *mean*, dan perhitungan standar deviasi. Kemudian langkah kedua adalah dengan melakukan pengujian instrumen penelitian yang meliputi, uji validitas dan uji reliabilitas. Metode yang digunakan untuk uji validitas adalah metode *Pearson Product Moment* dimana  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dinyatakan valid, dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) 5%. Sedangkan untuk uji reliabilitas metode yang digunakan adalah *inter-item consistency reliability* dengan pengujian *cronbach's alpha*.

### 3.2.4. Pengujian Hipotesis

Tahap pertama adalah menentukan metode analisis data, yaitu metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan cara membandingkan dengan tingkat signifikansi, nilai probabilitas  $< 0,05$ , dan membandingkan nilai dari  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, namun jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Tahap kedua adalah melakukan penghitungan koefisien determinasi untuk melihat seberapa persen dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

## 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pejabat SKPD dengan total 341 responden. Sampel yang digunakan sama dengan populasi. Kriteria yang ditetapkan bagi responden yaitu dapat memahami secara teknis mengenai prosedur penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran di SKPD. Kuesioner dibagikan kepada pejabat SKPD. Kuesioner yang disebarakan kepada responden berjumlah 341 kuesioner sesuai dengan jumlah jabatan struktural SKPD. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 91 kuesioner, dan yang dapat digunakan adalah 201 kuesioner. Sebanyak 49 kuesioner tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak diisi secara lengkap dan sesuai petunjuk. Rincian penyebaran dan pengembalian kuesioner penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Kuesioner yang disebarakan	341	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(91)	26,7%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	(49)	14,4%
Kuesioner yang dapat digunakan dalam pengolahan data	201	58,9%

*Sumber: data primer diolah, 2019*

### 4.2. Karakteristik Responden

Berdasarkan data kuesioner yang dapat diolah, karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi sesuai jenis kelamin dan jabatan. Karakteristik data pegawai SKPD (Tabel 3) berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa dari 201 orang responden, sebanyak 112 orang responden berjenis kelamin laki-laki (55,7%) dan 89 orang responden (44,3%) berjenis kelamin perempuan.

Tabel 5. Karakteristik Pegawai SKPD Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Presentase
1.	Laki-Laki	112	55,7%
2.	Perempuan	89	44,3%
Total		201	100%

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tingkat jabatan dari 201 kuesioner yang dapat diolah menunjukkan bahwa 29 orang responden menjabat sebagai Kepala SKPD (14,4%). Sedangkan 22 orang responden (10,9%) menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian Keuangan terdiri 16 orang responden (8,0%). Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri dari 17 orang responden (8,5%). Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari 1 orang responden (0,5%). Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebanyak 10 orang responden (5,0%). Kepala Sub Bagian untuk Sekretaris Daerah sebanyak 21 orang responden (10,4%). Kepala Bidang meliputi 85 orang responden (42,3%).

Tabel 6. Karakteristik Pegawai SKPD Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1.	Kepala SKPD	29	14,4%
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	22	10,9%
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	16	8,0%
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	17	8,5%
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	0,5%
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	10	5,0%
7.	Kepala Sub Bagian Untuk Sekretaris Daerah	21	10,4%
8.	Kepala Bidang	85	42,3%
Total		201	100%

Sumber : data primer diolah, 2019

### 4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan data statistik deskriptif dengan jumlah sampel 201 orang responden menunjukkan bahwa skor terendah dari 5 pernyataan pada variabel *Good Government Governance* sebesar 12, dan skor tertinggi sebesar 20. Jarak antara skor terendah dan tertinggi sebesar 8, dengan rata-rata skor sebesar 16,50 dan standar deviasi sebesar 1,820. Sedangkan untuk 9 pernyataan dari variabel Kualitas Anggaran SKPD mempunyai skor terendah sebesar 23, dan skor tertinggi sebesar 36. Jarak antara skor terendah dan skor tertinggi sebesar 13, dengan rata-rata skor sebesar 30,38 dan standar deviasi sebesar 3,293. Tabel 7 menunjukkan sebaran data responden untuk dua variabel yang diukur dalam penelitian ini.

Tabel 7. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
<i>Good Government Governance</i>	201	8	12	20	16,50	1,820
Kualitas Anggaran SKPD	201	13	23	36	30,38	3,293

Sumber : data primer diolah, 2019

### 4.4. Uji Validitas

Bedasarkan taraf signifikansi sebesar 5% dan  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0,138 ( $201-2= 199$ ) yang berasal dari distribusi nilai  $r_{\text{tabel}}$  statistik, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas pada variabel *Good Government Governance* untuk seluruh pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  maka pertanyaan dinyatakan valid. Masing-masing pertanyaan untuk variabel *Good Government Governance* lebih besar daripada  $r_{\text{tabel}}$ , sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas Good Government Governance

No. Item	$r_{\text{hitung}}$	$r_{\text{tabel}}$	Sig.	Kriteria
1	0,659	0,138	0,000	Valid
2	0,692	0,138	0,000	Valid
3	0,794	0,138	0,000	Valid
4	0,725	0,138	0,000	Valid

5	0,720	0,138	0,000	Valid
---	-------	-------	-------	-------

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan asumsi yang sama, hasil pengujian validitas untuk Kualitas Anggaran SKPD menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Tabel 8 menunjukkan bahwa  $r_{hitung}$  untuk tiap-tiap item pertanyaan dari variabel Kualitas Anggaran SKPD lebih besar daripada  $r_{tabel}$ . Sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Pengujian Validitas Kualitas Anggaran SKPD

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Sig.	Kriteria
1	0,644	0,138	0,000	Valid
2	0,748	0,138	0,000	Valid
3	0,677	0,138	0,000	Valid
4	0,679	0,138	0,000	Valid
5	0,768	0,138	0,000	Valid
6	0,722	0,138	0,000	Valid
7	0,733	0,138	0,000	Valid
8	0,701	0,138	0,000	Valid
9	0,771	0,138	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah, 2019

#### 4.4 Uji Reliabilitas

Tabel 10. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
<i>Good Government Governance</i>	0,747	0,60	Reliabel
Kualitas Anggaran SKPD	0,881	0,60	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada Tabel 10 diperoleh nilai *cronbach's alpha* untuk variabel *Good Government Governance* sebesar 0,747 dan variabel Kualitas Anggaran SKPD

sebesar 0,881 lebih besar dari 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan yang ada pada kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan jawaban responden konsisten.

#### 4.5. Pengujian Regresi Linear Sederhana

Hasil dari pengujian regresi linier sederhana dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Undstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,800	1,472		5,979	0,000
GGG	1,308	0,089	0,723	14,750	0,000

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear sederhana pada Tabel 11, diperoleh nilai konstanta sebesar 8,800 dan koefisien regresi sebesar 1,308. Apabila dirumuskan dalam persamaan regresi linear sederhana menjadi  $Y = 8,800 + 1,308 X$ . Koefisien regresi memiliki nilai positif, maka pengaruh variabel *good government governance* (X) terhadap variabel kualitas anggaran SKPD (Y) searah.

Nilai signifikansi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran SKPD. Nilai signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansinya yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *good government governance* maka akan semakin tinggi kualitas anggaran SKPD. Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  dalam penelitian ini sebesar 14,750 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,971 ( $df = n (201) - k - 1 = 199$ ), maka nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak. Sehingga penerapan *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Hdan kesetaraan. Prinsip-prinsip *good government governance* yang meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan dalam perencanaan anggaran akan berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD.

## Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square
0,723	0,522

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 12 nilai korelasi (R) sebesar 0,723. Untuk koefisien determinasi diperoleh dari nilai *R Square* sebesar 0,522, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *good government governance* (X) dapat menjelaskan variabel kualitas anggaran SKPD (Y) sebesar 52,2%.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada 201 responden di 55 SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta ditemukan bahwa penerapan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kualitas anggaran. Semakin baik penerapan *Good Government Governance*, semakin baik pula kualitas anggaran SKPD yang dihasilkan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya komitmen dari pegawai SKPD untuk menerapkan *good government governance* sebagai prinsip dasar perilaku dalam penyusunan anggaran berdasarkan teori penetapan tujuan, mampu mendorong penyusunan anggaran yang berkualitas.

### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat 91 eksemplar kuesioner yang tidak kembali dari seluruh kuesioner yang disebarakan oleh peneliti. Penelitian ini mungkin akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda jika semua kuesioner kembali dan terisi semua. Penelitian ini hanya menginvestigasi pengaruh penerapan variabel *Good Government Governance* terhadap kualitas anggaran SKPD, tanpa memperhatikan pengaruh variabel lain. Ruang lingkup penelitian juga terbatas pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

### 5.3. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian. Responden dapat diperluas dari berbagai kabupaten dalam satu provinsi, sehingga akan mendapatkan cakupan

yang luas dan hasilnya dapat dibandingkan antar kabupaten. Saran bagi pemerintah, agar selalu menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada *Good Government Governance* dalam proses kegiatan penyusunan anggaran. Hal ini agar kualitas anggaran akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## REFERENSI

- Carlitz, Ruth (2013), "Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives". *Development Policy Review*. Volume 31: 549-567.
- Egbide, C.B dan Godwyns A. Agbude (2012), "Good Budgeting and Good governance: A Comparative Discourse". *The Public Administration and Social Policies Review*. IV Year, No. 2 (9): 55.
- Handayani, Dwi Bestari (2009), Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2009: 31-40
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2008), Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Jakarta. Diakses tanggal 27 Agustus 2018
- Lubis, Arfan Ikhsan (2017), Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Lucyanda, Jurica dan Maylia Pramono Sari (2009), Reformasi Anggaran dan Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 1, No. 2, September 2009, pp. 76-85
- Marpaung, Lodewik. 2016. "Pengaruh Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Anggaran Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Mustami, Adinda Ade dan Sanny Cicilia (2017), Kualitas Anggaran Daerah Rendah". <https://nasional.kontan.co.id/news/kualitas-anggaran-daerah-rendah>. Diakses tanggal 13 Desember 2018
- Octariani, Devie (2016), "Pengaruh Penerapan Good Governance, Anggaran Berbasis Kinerja, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Anggaran Skpd Pemerintah Kabupaten Sumbawa". *Tesis*. Nusa Tenggara Barat
- Octariani, Devie, Akram, dan Animah (2017), "Good Governance, Performance Based Budgeting and SKPD Budget Quality SKPD (The Case of a Structural Model Approach)". *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* Vol.21 (2), November 2017, 117-13
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses tanggal 20 September 2018

- Putri, Daniati (2011), “ Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Anggaran Dengan Regulasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kota Padang”. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* Vol. 6, No. 1, April 2011
- Razak, Abdul Hamied (2018), “ Silpa Pemkot Jogja Tinggi, Awas, Bisa Jadi Masalah Baru”. <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/07/31/510/931048/silpa-\pemkot-jogja-tinggi-awas-bisa-jadi-masalah-baru>. Diakses tanggal 11 Desember 2018
- Segara, Lalu Danny (2017), “ Analisis Determinan Good Government Governance Serta Implikasinya Pada Kualitas LAKIP”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5, No.1, April 2017
- Sugiyono (2014), “ *Statistika untuk Penelitian*”. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono (2017), “ *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*”. Alfabeta, Bandung.
- Tarmizi, Tashadi (2007), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi Kasus Pemerintah Kota Pontianak Periode 2003-2007”. *Tesis*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.